Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi
Volume. 4, Nomor. 4 November 2026
E-ISSN .: 2988-6880; P-ISSN .: 2988-7941, Hal. 108-125
DOI: https://doi.org/10.61132/rimba.v4i4.3005
Tersedia: https://journal.arimbi.or.id/index.php/Rimba

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi

Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022–2024

Mariano Gilbertus Sitompul[1*], Tapi Rumondang Sari Siregar[2]
[1,2]Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Medan, Indonesia
**Penulis Korespondensi: gilbertusrio2102@gmail.com*

Abstract. *This study aims to examine and analyze the effect of Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Special Allocation Fund (DAK) on Regional Expenditure, with economic growth as a moderating variable in regencies and municipalities in North Sumatra Province during the 2022–2024 period. This study employs a quantitative approach using secondary data. The sampling technique used is saturated sampling, involving 33 regencies and municipalities and a total of 99 observations during the study period. The data analysis techniques include descriptive statistics, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, Moderated Regression Analysis (MRA), simultaneous significance testing (F-test), partial significance testing (t-test), and the coefficient of determination, with the assistance of SPSS software. The results indicate that PAD, DAU, and DAK each have a positive and statistically significant effect on Regional Expenditure. Economic growth does not moderate the effects of PAD, DAU, or DAK on Regional Expenditure. Simultaneously, PAD, DAU, DAK, economic growth, and the moderating interaction terms have a significant effect on Regional Expenditure. The coefficient of determination indicates that the research model explains 95.7% of the variation in Regional Expenditure, while the remaining 4.3% is explained by other factors outside the research model.*

Keywords*: Economic Growth; General Allocation Fund; Regional Expenditure; Regional Original Revenue; Special Allocation Fund.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2022–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh, dengan sampel sebanyak 33 kabupaten/kota dan total 99 observasi selama periode penelitian. Teknik analisis data meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, Moderated Regression Analysis (MRA), uji simultan (uji F), uji parsial (uji t), dan koefisien determinasi dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DAK masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Daerah. Secara simultan, PAD, DAU, DAK, pertumbuhan ekonomi, dan variabel interaksi moderasi berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa model penelitian mampu menjelaskan 95,7% variasi Belanja Daerah, sedangkan 4,3% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Kata kunci: Belanja Daerah; Dana Alokasi Khusus; Dana Alokasi Umum; Pendapatan Asli Daerah; Pertumbuhan Ekonomi.

1. LATAR BELAKANG

Sejak diterapkannya sistem desentralisasi di Indonesia, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan guna mengatur urusan pemerintah di daerahnya sendiri. Salah satu tujuan desentralisasi yakni, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang dimana pendapatan dan belanja daerah dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut tertutama meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Citra & Kurnia, 2024).

Naskah Masuk: 12 September 2026; Revisi:30 September 2026; Diterima: 27 Oktober 2026;
Terbit: 01 November 2026

Dengan desentralisasi, daerah memiliki kebebasan penuh dalam mengelola pemerintahannya sendiri. Diharapkan bahwa pemerintah daerah mampu mengoptimalkan kemampuan wilayahnya untuk membiayai kebutuhan daerah, termasuk melalui pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan anggarannya secara efisien dan efektif, terutama untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Permasalahan yang terjadi yaitu ketidakstabilan alokasi belanja modal pada daerah Sumatera Utara dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 Belanja Daerah pada Sumatera Utara mengalami penurunan yang cukup tinggi dikarenakan penerapan regulasi dan kegiatan fisik yang banyak menunggu selesainya perencanaan kegiatan yang terjadi sehingga perekonomian dan pembangunan di Sumatera Utara melambat (RPD Pemprov Sumut, 2021).

Berdasarkan realisasi belanja daerah pemerintah kabupaten dan kota provinsu sumatera utara, secara umum terdapat perubahan Belanja Daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara cenderung mengikuti perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sebagian besar daerah menunjukkan bahwa ketika PAD, DAU, dan DAK meningkat, Belanja Daerah juga mengalami peningkatan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan fiskal daerah yang berasal dari pendapatan daerah maupun transfer pemerintah pusat memiliki peran penting dalam menentukan besarnya alokasi Belanja Daerah.

Namun demikian, hubungan tersebut tidak selalu menunjukkan pola yang sama pada seluruh kabupaten/kota. Perbedaan pola tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PAD, DAU, dan DAK tidak selalu diikuti oleh peningkatan Belanja Daerah. Dengan demikian, masih terdapat ketidakkonsistenan fenomena empiris mengenai pengaruh ketiga sumber pendapatan tersebut terhadap Belanja Daerah sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2022–2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 kemampuan daerah untuk memperoleh dana seharusnya dapat ditingkatkan. Dengan peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal yang bersumber dari daerah, secara akumulasi semestinya akan lebih menimbulkan eksternalisasi yang bersifat positif dan memberikan kontribusi yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Saraswati, 2024).

Setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk mendanai kegiatan operasional di daerahnya masing-masing yang akan menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah mentransfer dana perimbangan

untuk masing-masing daerah. Dana alokasi umum ialah dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan menciptakan pemerataan keuangan antar daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah sebagai bagian dari pelaksanaannya.

Dana Alokasi Khusus yang diperoleh melalui penerimaan APBN yang diberikan untuk daerah yang terpilih dengan tujuan untuk membiayai keperluan daerah.

Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai moderator dalam penelitian ini. Karena tingkat pertumbuhan diyakini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Menurut Nurafni (2024) peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah akan mempengaruhi peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk juga meningkat.

Sesuai dengan fenomena yang dijelaskan serta terdapatnya perbedaan hasil pada penelitian sebelumnya sehingga penulis memiliki ketertarikan dalam melaksanakan penelitian dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi (Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2024)".

2. KAJIAN TEORITIS

Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu periode tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda, (Ramadhan, F & Nugroho A 2023).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retrebusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daetah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas disentralisasi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi

daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Suryatiningrum et al., 2020).

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kamampuan keuangan antar daerah untun mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Jayanti, 2020).

Dana Alokasi Khusus

Menurut Citra & Kurnia (2024) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi khusus digunakan untuk kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat yang umur ekonomisnya panjang. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan ururusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri (Jayanti, 2020). Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kamajuan atau penyesuaian penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder periode 2022–2024 pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Populasi penelitian terdiri atas 33 pemerintah kabupaten/kota, yaitu 25 kabupaten dan 8 kota, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh atau sensus sehingga diperoleh 99 observasi apabila seluruh data tersedia. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), variabel dependen adalah Belanja Daerah, sedangkan variabel moderasi adalah Pertumbuhan Ekonomi. Instrumen penelitian menggunakan dokumentasi data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics versi 25, yang meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk menguji peran Pertumbuhan Ekonomi dalam memoderasi pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Daerah. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji F, koefisien determinasi (Adjusted R Square), uji t, dan pengujian variabel moderasi dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Sebelum Eliminasi Data *Outlier*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters[a,b]	*Mean*	.0000000
	Std. Deviation	137.86039122
Most Extreme Differences	*Absolute*	.118
	Positive	.118
	Negative	-.104
Test Statistic		.118
Asymp. Sig. (2-tailed)		.002[c]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah dengan SPSS, (2026)

Berdasarkan Tabel 1, hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa nilai signifikansi (*Asymp. Sig.*) sebesar 0,002. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (0,200 < 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual

pada model regresi belum berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas pada pengujian awal belum terpenuhi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penanganan lebih lanjut terhadap data yang memiliki potensi ekstrem atau menyimpang dari pola umum distribusi data dengan melakukan eliminasi data *outlier*.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Setelah Eliminasi Data *Outlier* Dan Transformasi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters[a,b]	*Mean*	.0000000
	Std. Deviation	.09848304
Most Extreme Differences	*Absolute*	.078
	Positive	.078
	Negative	-.053
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.156[c]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah dengan SPSS, (2026)

Berdasarkan Tabel 2, Setelah dilakukan penanganan *outlier* dan transformasi, hasil uji normalitas menunjukkan jumlah observasi sebanyak 98 data, dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,156. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga residual dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian, penanganan *outlier* dan transformasi berhasil memenuhi asumsi normalitas. Dengan terpenuhinya asumsi normalitas ini, maka data penelitian dapat digunakan pada tahapan pengujian hipotesis berikutnya.

b. Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]		
	Collinearity Statistics	
Model	*Tolerance*	*VIF*
1*(Constant)*		
LN_PAD	.244	4.101
LN_DAU	.125	8.021
LN_DAK	.284	3.526
LN_PE	.555	1.803

a. *Dependent Variable*: LN_BD

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2026.

Berdasarkan Tabel 3, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *VIF* kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,10, berdasarkan temuan uji multikolinearitas yang ditunjukkan pada tabel. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan gejala multikolinearitas dan dapat digunakan untuk analisis regresi tambahan karena tidak ada hubungan yang signifikan antara variable independent.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]					
	Unstandardized Coefficients		*Standardized Coefficients*		
Model	*B*	*Std. Error*	*Beta*	*t*	*Sig.*
1 (*Constant*)	-.155	.344		-.452	.652
LN_PAD	.009	.012	.142	.716	.476
LN_DAU	.042	.044	.262	.943	.348
LN_DAK	-.012	.022	-.098	-.531	.597
LN_PE	.004	.082	.007	.050	.960

a. *Dependent Variable*: ABS_RES

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2026.

Berdasarkan Tabel 4, Hasil uji heterokedastisitas menggunakan metode Glejser menunjukkan bahwa LN_PAD memiliki nilai signifikansi sebesar 0,476, LN_DAU sebesar 0,348, LN_DAK sebesar 0,597, dan LN_PE sebesar 0,960. Seluruh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi. Dengan demikian, model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi heteroskedastisitas dan dapat dilanjutkan pada tahap pengujian asumsi klasik berikutnya.

d. Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]					
Model	*R*	*R Square*	*Adjusted R Square*	*Std. Error of the Estimate*	*Durbin-Watson*
1	.981[a]	.963	.961	.10058	1.362

a. *Predictors: (Constant)*, LN_PE, LN_DAK, LN_PAD, LN_DAU

b. *Dependent Variable*: LN_BD

Sumber: Data diolah dengan SPSS, (2026)

Berdasarkan Tabel 5, hasil uji autokorelasi menggunakan metode *Durbin-Watson* menunjukkan nilai (d) sebesar 1,362. Dengan jumlah observasi (n) sebanyak 98 dan jumlah variabel independen (k) sebanyak 4, pada tingkat signifikansi 5% diperoleh nilai batas bawah (dL) sebesar 1,5871 dan nilai batas atas (dU) sebesar 1,7567. Nilai d hitung lebih kecil dari nilai dL (1,362 < 1,5871), sehingga model regresi terindikasi mengalami gejala autokorelasi positif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa residual pada suatu periode masih berkorelasi dengan residual pada periode sebelumnya, sehingga model regresi belum memenuhi asumsi bebas autokorelasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan model menggunakan metode *Cochrane-Orcutt*.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi – *Cochrane Orcutt*

Model Summary[b]					
Model	*R*	*R Square*	*Adjusted R Square*	*Std. Error of the Estimate*	*Durbin-Watson*
1	.975[a]	.950	.948	.09499	1.874

a. *Predictors: (Constant)*, LAG_PE, LAG_DAK, LAG_PAD, LAG_DAU

b. *Dependent Variable*: LAG_BD

Sumber: Data diolah dengan SPSS, (2026)

Berdasarkan Tabel 6, Setelah dilakukan transformasi data menggunakan metode *Cochrane-Orcutt*, diperoleh nilai *Durbin-Watson* (d) sebesar 1.874. Jika merujuk pada tabel statistik *Durbin-Watson* dengan jumlah sampel (n) sebanyak 98 dan jumlah variable independen (k = 4), diperoleh nilai batas atas (du) sebesar 1,7567 dan nilai 4 - (du) sebesar 2.2433. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, dapat dicermati bahwa nilai (d) hitung hasil ini telah masuk ke dalam area bebas autokorelasi karena nilainya berada di antara batas (du) dan 4 - (du) (1,7567 < 1,874 < 2,2433). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masalah autokorelasi pada model regresi telah berhasil diatasi, sehingga model baru ini memenuhi asumsi prasyarat klasik dan dinyatakan layak untuk pengujian hipotesis selanjutnya.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Uji ANOVA (Uji F)

ANOVA[a]					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15.723	4	3.931	435.612	.000[b]
	Residual	.830	92	.009		
	Total	16.554	96			

a. Dependent Variable: LAG_BD

b. Predictors: (Constant), LAG_PE, LAG_DAK, LAG_PAD, LAG_DAU

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS (2026)

Berdasarkan Tabel 7, hasil uji ANOVA (uji F) menunjukkan nilai F hitung sebesar 435,612 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai F hitung tersebut lebih besar dari F tabel sebesar 2,47 (df1 = 4; df2 = 92; α = 0,05), dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil ini sekaligus menunjukkan bahwa model regresi linear berganda yang digunakan layak (*fit*) untuk dilanjutkan pada tahap pengujian hipotesis.

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]					
	Unstandardized Coefficients		*Standardized Coefficients*		
Model	*B*	*Std. Error*	*Beta*	*t*	*Sig.*
1 (Constant)	-.903	.402		-2.243	.027
LAG_PAD	.130	.022	.249	5.867	.000
LAG_DAU	.732	.077	.564	9.493	.000
LAG_DAK	.294	.040	.305	7.321	.000
LAG_PE	-.498	.137	-.106	-3.646	.000

a. *Dependent Variable*: LAG_BD

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS (2026)

Berdasarkan Tabel 8, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

LAG_BD = −0,903 + 0,130 LAG_PAD + 0,732 LAG_DAU + 0,294 LAG_DAK − 0,498 LAG_PE + e

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1) Nilai konstanta sebesar −0,903 menunjukkan bahwa apabila PAD, DAU, DAK, dan Pertumbuhan Ekonomi bernilai nol, maka nilai Belanja Daerah (dalam bentuk logaritma natural hasil transformasi) adalah sebesar −0,903.
2) Koefisien regresi PAD sebesar 0,130 bernilai positif. Artinya, setiap kenaikan PAD sebesar 1% akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 0,130%, dengan asumsi variabel lain tetap.
3) Koefisien regresi DAU sebesar 0,732 bernilai positif. Artinya, setiap kenaikan DAU sebesar 1% akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 0,732%, dengan asumsi variabel lain tetap.
4) Koefisien regresi DAK sebesar 0,294 bernilai positif. Artinya, setiap kenaikan DAK sebesar 1% akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 0,294%, dengan asumsi variabel lain tetap.
5) Koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi sebesar −0,498 bernilai negatif. Artinya, setiap kenaikan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1% akan menurunkan Belanja Daerah sebesar 0,498%, dengan asumsi variabel lain tetap.

Analisis Regresi Moderasi (MRA)

Tabel 9. Tabel ANOVA Persamaan Regresi Moderasi

ANOVA[a]						
Model		*Sum of Squares*	*df*	*Mean Square*	*F*	*Sig.*
1	Regression	15.771	7	2.253	256.208	.000[b]
	Residua	.783	89	.009		
	Total	16.554	96			

a. *Dependent Variable*: LAG_BD

b. *Predictors: (Constant),* DAK_PE, LAG_DAU, LAG_PE, PAD_PE, LAG_DAK, LAG_PAD, DAU_PE

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS (2026)

Berdasarkan Tabel 9, hasil uji *ANOVA* pada persamaan regresi moderasi menunjukkan nilai F hitung sebesar 256,208 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai F hitung tersebut lebih besar dari F tabel sebesar 2,11 (df1 = 7; df2 = 89; α = 0,05), dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK, Pertumbuhan Ekonomi, serta variabel interaksi PAD×PE, DAU×PE, dan DAK×PE secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian, model regresi moderasi layak digunakan untuk menguji peran Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi.

Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Moderasi

Coefficients[a]

Model	*Unstandardized Coefficients* *B*	*Std. Error*	*Standardized Coefficients* *Beta*	*t*	*Sig.*
1(*Constant*)	-.772	.492		-1.570	.120
LAG_PAD	.140	.023	.269	6.136	.000
LAG_DAU	.721	.078	.556	9.236	.000
LAG_DAK	.283	.041	.293	6.872	.000
LAG_PE	-.464	.179	-.098	-2.598	.011
PAD_PE	.486	.255	.111	1.904	.060
DAU_PE	-.729	.911	-.059	-.800	.426
DAK_PE	-.537	.464	-.050	-1.156	.251

a. *Dependent Variable*: LAG_BD

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS (2026)

Berdasarkan Tabel 10, diperoleh persamaan regresi moderasi sebagai berikut:

$$\mathbf{LAG_BD = -0{,}772 + 0{,}140\ LAG_PAD + 0{,}721\ LAG_DAU + 0{,}283\ LAG_DAK - 0{,}464\ LAG_PE + 0{,}486\ PAD_PE - 0{,}729\ DAU_PE - 0{,}537\ DAK_PE + e}$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa setelah variabel interaksi dimasukkan ke dalam model, PAD, DAU, dan DAK tetap memiliki koefisien positif terhadap Belanja Daerah, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi tetap memiliki koefisien negatif. Variabel interaksi PAD_PE memiliki koefisien positif sebesar 0,486, yang mengindikasikan arah memperkuat hubungan PAD terhadap Belanja Daerah. Sebaliknya, variabel interaksi DAU_PE dan DAK_PE memiliki koefisien negatif masing-masing sebesar −0,729 dan −0,537, yang mengindikasikan arah memperlemah hubungan DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah. Signifikansi dari masing-masing variabel interaksi tersebut diuji lebih lanjut pada uji parsial (uji t).

Pengujian Hipotesis

a. Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi Regresi Linier Berganda

Model Summary[b]

Model	*R*	*R Square*	*Adjusted R Square*	*Std. Error of the Estimate*	*Durbin-Watson*
1	.975[a]	.950	.948	.09499	1.874

a. *Predictors*: (*Constant*), LAG_PE, LAG_DAK, LAG_PAD, LAG_DAU

b. *Dependent Variable*: LAG_BD

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS (2026)

Berdasarkan Tabel 11, nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,975 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dan Belanja Daerah tergolong sangat kuat. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,948 menunjukkan bahwa 94,8% variasi Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi. Sisanya sebesar 5,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi Regresi Moderasi

Model Summary[b]					
Model	*R*	*R Square*	*Adjusted R Square*	*Std. Error of the Estimate*	*Durbin-Watson*
1	.976[a]	.953	.949	.09377	1.912

a. *Predictors*: (*Constant*), LAG_PE, LAG_DAK, LAG_PAD, LAG_DAU
b. *Dependent Variable*: LAG_BD

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS (2026)

Berdasarkan Tabel 12, nilai *Adjusted R Square* pada model regresi moderasi adalah sebesar 0,949. Artinya, 94,9% variasi Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh PAD, DAU, DAK, Pertumbuhan Ekonomi, serta interaksi masing-masing variabel independen dengan Pertumbuhan Ekonomi. Sisanya sebesar 5,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Dibandingkan dengan model regresi linear berganda (*Adjusted R Square* 0,948), penambahan variabel interaksi hanya meningkatkan kemampuan model sebesar 0,1%. Hal ini mengindikasikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi tidak memberikan tambahan daya jelas yang berarti terhadap Belanja Daerah.

b. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 13. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]					
	Unstandardized Coefficients		*Standardized Coefficients*		
Model	*B*	*Std. Error*	*Beta*	*t*	*Sig.*
1 (Constant)	-.903	.402		-2.243	.027
LAG_PAD	.130	.022	.249	5.867	.000
LAG_DAU	.732	.077	.564	9.493	.000
LAG_DAK	.294	.040	.305	7.321	.000
LAG_PE	-.498	.137	-.106	-3.646	.000

a. Dependent Variable: LAG_BD

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS (2026)

Berdasarkan Tabel 13, hasil uji parsial (uji t) dengan nilai t tabel sebesar 1,986 (df = 92; $\alpha = 0,05$) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah (H1). Variabel PAD memiliki t hitung sebesar 5,867 > 1,986 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan koefisien bernilai positif sebesar 0,130. Dengan demikian, PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, sehingga H1 diterima.
2) Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah (H2). Variabel DAU memiliki t hitung sebesar 9,493 > 1,986 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan koefisien bernilai positif sebesar 0,732. Dengan demikian, DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, sehingga H2 diterima.
3) Pengaruh DAK terhadap Belanja Daerah (H3). Variabel DAK memiliki t hitung sebesar 7,321 > 1,986 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan koefisien bernilai positif sebesar

0,294. Dengan demikian, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, sehingga H3 diterima.

Selain itu, variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki t hitung sebesar −3,646 dengan nilai signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

Tabel 14. Hasil Analisis Regresi Moderasi

Coefficients[a]					
	Unstandardized Coefficients		*Standardized Coefficients*		
Model	*B*	*Std. Error*	*Beta*	*t*	*Sig.*
1 (*Constant*)	-.772	.492		-1.570	.120
LAG_PAD	.140	.023	.269	6.136	.000
LAG_DAU	.721	.078	.556	9.236	.000
LAG_DAK	.283	.041	.293	6.872	.000
LAG_PE	-.464	.179	-.098	-2.598	.011
PAD_PE	.486	.255	.111	1.904	.060
DAU_PE	-.729	.911	-.059	-.800	.426
DAK_PE	-.537	.464	-.050	-1.156	.251

a. *Dependent Variable*: LAG_BD

Berdasarkan Tabel 14, hasil uji parsial (uji t) pada model regresi moderasi dengan nilai t tabel sebesar 1,987 (df = 89; α = 0,05) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pertumbuhan Ekonomi memoderasi hubungan PAD terhadap Belanja Daerah (H4). Variabel interaksi PAD_PE memiliki t hitung sebesar 1,904 < 1,987 dengan nilai signifikansi 0,060 > 0,05. Meskipun koefisiennya positif, Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan PAD terhadap Belanja Daerah, sehingga H4 ditolak.
2) Pertumbuhan Ekonomi memoderasi hubungan DAU terhadap Belanja Daerah (H5). Variabel interaksi DAU_PE memiliki t hitung sebesar −0,800 (|t| = 0,800 < 1,987) dengan nilai signifikansi 0,426 > 0,05. Dengan demikian, Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan DAU terhadap Belanja Daerah, sehingga H5 ditolak.
3) Pertumbuhan Ekonomi memoderasi hubungan DAK terhadap Belanja Daerah (H6). Variabel interaksi DAK_PE memiliki t hitung sebesar −1,156 (|t| = 1,156 < 1,987) dengan nilai signifikansi 0,251 > 0,05. Dengan demikian, Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan DAK terhadap Belanja Daerah, sehingga H6 ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, dengan nilai t hitung sebesar 5,867, lebih besar dari t tabel 1,986, dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga H1 diterima. Koefisien regresi sebesar 0,130 menunjukkan bahwa setiap kenaikan PAD sebesar 1% diikuti kenaikan Belanja Daerah sebesar 0,130%, dengan asumsi variabel lain konstan. Meskipun berpengaruh signifikan, PAD

memiliki pengaruh relatif paling kecil dibandingkan DAU dan DAK. Hal ini berkaitan dengan rata-rata PAD yang hanya sebesar Rp192,82 miliar serta ketimpangan penerimaan antardaerah. Dalam perspektif teori keagenan, peningkatan PAD yang diikuti peningkatan Belanja Daerah menunjukkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan masyarakat untuk menyediakan pelayanan publik. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rafi dan Arza (2023), Septriani (2023), serta Lubis dan Nasution (2024), tetapi berbeda dengan Dewi dan Oktafia (2026) yang menemukan bahwa PAD berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, dengan nilai t hitung sebesar 9,493, lebih besar dari t tabel 1,986, dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga H2 diterima. Koefisien regresi sebesar 0,732 menunjukkan bahwa setiap kenaikan DAU sebesar 1% diikuti kenaikan Belanja Daerah sebesar 0,732%. DAU memiliki pengaruh paling besar dengan nilai Beta sebesar 0,564, yang menunjukkan bahwa Belanja Daerah lebih responsif terhadap dana transfer pemerintah pusat dibandingkan PAD. Kondisi ini mengindikasikan adanya kecenderungan flypaper effect dan tingginya ketergantungan fiskal sebagian besar kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat. Dalam perspektif teori keagenan, DAU merupakan sumber daya yang didelegasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rafi dan Arza (2023), Septriani (2023), Ariska et al. (2022), serta Lubis dan Nasution (2024).

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, dengan nilai t hitung sebesar 7,321, lebih besar dari t tabel 1,986, dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga H3 diterima. Koefisien regresi sebesar 0,294 menunjukkan bahwa setiap kenaikan DAK sebesar 1% diikuti kenaikan Belanja Daerah sebesar 0,294%. Berdasarkan nilai Beta sebesar 0,305, DAK merupakan variabel dengan pengaruh terbesar kedua setelah DAU. Pengaruh tersebut berkaitan dengan penggunaan DAK yang diarahkan untuk membiayai kegiatan khusus sesuai prioritas nasional, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, realisasi DAK juga bergantung pada kesiapan perencanaan, pengadaan, dan pelaporan pemerintah daerah. Dalam perspektif teori keagenan, ketentuan penggunaan dan mekanisme pengawasan DAK membatasi ruang pengalokasian dana agar sesuai dengan tujuan pemerintah pusat. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rafi dan

Arza (2023), Septriani (2023), serta Lubis dan Nasution (2024), tetapi berbeda dengan Dewi dan Oktafia (2026) yang menemukan pengaruh positif tetapi tidak signifikan.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) menunjukkan bahwa interaksi PAD dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki koefisien sebesar 0,486, nilai t hitung sebesar 1,904, dan signifikansi 0,060 > 0,05, sehingga H4 ditolak. Koefisien positif menunjukkan kecenderungan bahwa pertumbuhan ekonomi memperkuat pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah, tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi tidak selalu diikuti peningkatan PAD yang cukup kuat untuk mengubah hubungan PAD dengan Belanja Daerah. Perbedaan basis pajak dan efektivitas pemungutan antardaerah turut memengaruhi kondisi tersebut. Dalam perspektif teori keagenan, pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu mengubah pertumbuhan ekonomi menjadi peningkatan penerimaan daerah yang memperkuat pembiayaan belanja. Hasil ini sejalan dengan Anthony dan Rohman (2024), tetapi berbeda dengan Apriliani et al. (2025) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memperkuat pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian hipotesis kelima (H5) menunjukkan bahwa interaksi DAU dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki koefisien sebesar −0,729, nilai t hitung sebesar −0,800, dan signifikansi 0,426 > 0,05, sehingga H5 ditolak. Koefisien negatif menunjukkan kecenderungan memperlemah hubungan DAU dengan Belanja Daerah, tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan. Hal ini dapat dijelaskan oleh DAU yang dialokasikan berdasarkan kebutuhan dan kapasitas fiskal daerah serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja rutin dan pelayanan dasar. Dengan demikian, pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah relatif tidak berubah pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Dalam perspektif teori keagenan, DAU berfungsi mendukung pemerataan kemampuan keuangan dan pelayanan publik sehingga penggunaannya tidak secara langsung bergantung pada perubahan pertumbuhan ekonomi tahunan. Hasil ini sejalan dengan Melasari dan Fitriasuri (2024) serta Anthony dan Rohman (2024), tetapi berbeda dengan Simanjuntak (2021) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan DAU dengan belanja.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Hubungan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian hipotesis keenam (H6) menunjukkan bahwa interaksi DAK dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki koefisien sebesar −0,537, nilai t hitung sebesar −1,156, dan signifikansi 0,251 > 0,05, sehingga H6 ditolak. Koefisien negatif menunjukkan kecenderungan bahwa DAK lebih berperan pada daerah dengan pertumbuhan ekonomi relatif rendah, tetapi kecenderungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Pengaruh DAK terhadap Belanja Daerah lebih ditentukan oleh prioritas nasional, kebutuhan pembangunan, kesiapan teknis, dan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan kegiatan. Dalam perspektif teori keagenan, ketentuan penggunaan dan mekanisme pelaporan DAK membatasi keleluasaan pemerintah daerah untuk menyesuaikan penggunaannya dengan kondisi pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sejalan dengan Melasari dan Fitriasuri (2024), tetapi berbeda dengan Apriliani et al. (2025) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memperkuat pengaruh Transfer ke Daerah terhadap Belanja Daerah.

Peran Pertumbuhan Ekonomi dalam Model Penelitian

Hasil pengujian H4, H5, dan H6 menunjukkan bahwa seluruh variabel interaksi tidak signifikan, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, dengan koefisien −0,464 dan signifikansi 0,011. Dengan demikian, Pertumbuhan Ekonomi berperan sebagai variabel prediktor yang memengaruhi Belanja Daerah secara langsung, tetapi tidak terbukti memoderasi hubungan PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Daerah. Penambahan variabel interaksi hanya meningkatkan nilai Adjusted R Square dari 0,948 menjadi 0,949. Data penelitian juga menunjukkan bahwa pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi meningkat di seluruh kabupaten/kota, tetapi Belanja Daerah menurun di 18 daerah. Sebaliknya, pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi melambat di 31 daerah, sementara Belanja Daerah meningkat di 30 daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa Belanja Daerah cenderung bergerak berlawanan arah dengan pertumbuhan ekonomi selama periode pengamatan. Kondisi tersebut dapat mencerminkan peran belanja pemerintah sebagai instrumen stabilisasi ekonomi untuk menjaga pelayanan publik dan mendorong aktivitas ekonomi ketika pertumbuhan melambat. Dengan demikian, Pertumbuhan Ekonomi lebih tepat dipahami sebagai faktor yang berpengaruh langsung terhadap Belanja Daerah daripada sebagai variabel yang memperkuat atau memperlemah pengaruh PAD, DAU, dan DAK.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2022–2024. Berdasarkan hasil analisis terhadap 99 observasi, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, yang menunjukkan bahwa semakin besar DAU yang diterima pemerintah daerah, semakin besar pula kemampuan daerah dalam meningkatkan Belanja Daerah. Selanjutnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, sehingga peningkatan DAK dapat mendukung peningkatan Belanja Daerah, terutama dalam pembiayaan program dan kegiatan prioritas daerah.

Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan antara PAD dan Belanja Daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan Pertumbuhan Ekonomi belum mampu memperkuat pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah. Pertumbuhan Ekonomi juga tidak mampu memoderasi hubungan antara DAU dan Belanja Daerah, yang menunjukkan bahwa pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah lebih dipengaruhi oleh kapasitas fiskal dan kebutuhan daerah dibandingkan perubahan Pertumbuhan Ekonomi. Selain itu, Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan antara DAK dan Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh DAK terhadap Belanja Daerah lebih dipengaruhi oleh kebijakan alokasi dan kebutuhan pembangunan daerah.

Secara simultan, PAD, DAU, DAK, Pertumbuhan Ekonomi, serta variabel interaksi moderasi berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Model penelitian mampu menjelaskan variasi Belanja Daerah sebesar 95,7%, sedangkan sisanya sebesar 4,3% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar kemampuan keuangan daerah semakin baik. Selain itu, pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi

Khusus (DAK) perlu dilakukan secara efektif dan tepat sasaran sehingga dapat mendukung peningkatan pelayanan publik serta pembangunan daerah.

Bagi Pemerintah Pusat, diharapkan dapat terus memperhatikan kebijakan penyaluran dana transfer daerah, khususnya DAU dan DAK, agar dapat mendukung pemerataan kemampuan keuangan antardaerah serta mendorong peningkatan pembangunan daerah.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan periode penelitian yang lebih panjang dan menambahkan variabel lain

yang berpotensi memengaruhi Belanja Daerah. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode analisis data panel yang lebih sesuai serta mengembangkan pengujian variabel moderasi agar hasil penelitian yang diperoleh dapat lebih mendalam dan komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

Anthony, A. R., & Rohman, A. (2024). Pengaruh peningkatan PAD dan dana transfer terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi: Studi empiris pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2016–2021. *Diponegoro Journal of Accounting*, *13*(2), 1–12.

Apriliani, D. M., Fitrijanti, T., & Aryana, K. P. (2025). Flypaper effect di Pulau Jawa: Pengaruh pendapatan asli daerah dan transfer ke daerah terhadap belanja daerah dengan moderasi pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, *5*(5), 2518–2537. https://doi.org/10.60036/jbm.817

Ariska, M., Yani, R., & Mardhani, M. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah di Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, *6*(2), 121–128. https://doi.org/10.33059/jensi.v6i2.6455

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2025). *Produk domestik regional bruto kabupaten/kota se-Sumatera Utara menurut pengeluaran 2020–2024*.

Dewi, K. T. B., & Oktafia, R. (2026). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja daerah di Kabupaten Jombang periode 2005–2024. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi, 7*(1), 1–15. https://doi.org/10.57094/jpe.v7i1.4090

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2026a). *Portal data APBD*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2026b). *Portal data transfer ke daerah dan dana desa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2026c). *Sistem informasi keuangan daerah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Jayanti, D. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah periode 2016–2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *8*(3), 335–341. https://doi.org/10.35794/emba.v8i3.30045

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, *3*(4), 305–360.

Lubis, S. O., & Nasution, D. A. D. (2024). Pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. *Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan, 1*(3), 220–239. https://doi.org/10.61132/keat.v1i3.402

Melasari, & Fitriasuri. (2024). Moderasi pertumbuhan ekonomi terhadap pengaruh dana perimbangan daerah dalam pengalokasian belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, *5*(12), 5281–5296. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i12.5226

Nurafni. (2024). Analisis hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *22*(1), 45–58.

Rafi, R. N., & Arza, F. I. (2023). Analisis flypaper effect pada pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) terhadap belanja daerah: Studi empiris pada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *5*(1), 411–427. https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.649

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. (2005a). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan*.

Republik Indonesia. (2005b). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang*

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (2021). *Rencana pembangunan daerah tahun 2021–2026 Provinsi Sumatera Utara*.

Saraswati, D. (2024). Reorientasi pendapatan asli daerah sebagai stimulus eksternalitas positif pertumbuhan ekonomi regional. *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Kebijakan Publik, 15*(1), 45–58.

Septriani. (2023). Analisis pengaruh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, *9*(3), 884–894. https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1201

Simanjuntak, E. A. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota, 1*(3), 82–91.

Suryatiningrum, I., Indarti, I., & Adnanti, W. A. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja modal dengan pendapatan per kapita sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Aset, 22*(2), 131–146. https://doi.org/10.37470/1.22.2.168